

Strategi Pendidikan Islam Bagi Masyarakat Perkotaan: Studi Analisis Pemerataan Pendidikan di Denpasar, Bali

Muhammad Shodiq¹, Alaika M. Bagus Kurnia PS²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya

Email: ¹moh.shodiq@uinsa.ac.id, ²alaika.ps@ikbis.ac.id

| | | | |
|-----------|----|------|------|
| Diterima | 21 | Mei | 2024 |
| Disetujui | 21 | Juni | 2024 |
| Dipublish | 30 | Juni | 2024 |

Abstract

This research aims to examine more deeply how the role of Islamic education in showing the existence of equal education in Muslim minority areas. The research in this article is qualitative research. By using literature study data collection and several documents from statistical institutions in the city of Denpasar Bali. The analysis technique in this research, using case study analysis techniques. So as to be able to suppress some of the problems of equalization of education by using John Rawls' theory of social justice. The formulation of the problem is, How is the Condition of Denpasar Society Regarding Education Equality? Second, what is the condition of Islamic education equity in Denpasar? And the third is, how is the role of Islamic education in continuing the equalization of education in Denpasar? So that the definition of equity has a different pattern in the perspective of Islamic education.

Keywords: *Islamic Education, Equity, Community, Urban.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam bagaimana peran pendidikan Islam dalam menunjukkan eksistensi pemerataan pendidikan di daerah minoritas muslim. Penelitian pada artikel ini ialah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pengambilan data studi Pustaka dan beberapa dokumen dari lembaga statistik di kota Denpasar Bali. Adapun Teknik analisis pada penelitian ini, menggunakan Teknik analisis studi kasus. Sehingga mampu menekan beberapa permasalahan pemerataan pendidikan dengan menggunakan teori keadilan sosial John Rawls. Adapun rumusan masalahnya ialah, Bagaimana Kondisi Masyarakat Denpasar Terkait Pemerataan Pendidikan? Kedua, bagaimana kondisi pemerataan pendidikan Islam di Denpasar? Dan ketiga ialah, bagaimana peran pendidikan Islam dalam melangsungkan pemerataan pendidikan di Denpasar? Sehingga definisi pemerataan memiliki pola yang berbeda dalam sudut pandang pendidikan Islam.

Kata kunci: *Pendidikan Islam, Pemerataan, Masyarakat, Perkotaan.*

Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia, adalah bagian dari pemerataan secara mayor pada kontestasi pendidikan di Indonesia. Hal demikian secara tidak sadar masyarakat mendefinisikan secara dikotomi antara pendidikan agama dengan umum. Sehingga mereka secara mudah memahaminya mengenai kebutuhan rohani

dengan kebutuhan duniawi (Salim & Sari, 2014)

Pandangan masyarakat tersebut juga tidak lepas dari kebutuhan mereka atas output peserta didik yang ditinjau oleh masyarakat memiliki prestasi yang bagus. Sudah barang tentu strategi tersebut dapat dilihat dari bagaimana promosi lembaga yang berada dibawah payung pemerintah, memiliki daya



tarik secara umum, ketimbang swasta.

Pada dasarnya, mereka yang berada dibawah naungan swasta, dalam hal ini pengelolaan pendidikannya sendiri dilakukan secara garis besar tanpa ada bantuan pemerintah secara menyeluruh. Sehingga perlu adanya pengawalan dari beberapa pihak, salah satu yang paling menonjol adalah tokoh masyarakat (Arif & Arafa, 2023).

Peran masyarakat dalam melakukan perbandingan antar lembaga memicu dalam berkompetisi pada setiap lembaga untuk menonjolkan prestasi dan ciri khasnya. Sebagaimana sebagian besar mereka, mencari sekolah yang terbaik untuk anaknya, dengan catatan biaya terjangkau. Hal ini berbeda dengan penduduk yang berada pada taraf ekonomi yang tinggi. Ia rela mengeluarkan biaya yang banyak demi menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang baik, berkualitas dan memberikan jaminan luaran yang dijanjikan. Sebab disetiap lembaga pendidikan saat ini, semuanya melakukan penjaminan mutu, baik dari penetapan standar, pemenuhan standar, evaluasi hingga peningkatan mutu (Umar & Ismail, 2018).

Peningkatan mutu ini mulai mencuat saat beberapa lembaga sekolah berlomba-lomba mencapai taraf sekolah internasional atau biasa disebut Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Ciri khas pembelajaran pada sekolah tersebut ialah dengan menerapkan pembelajaran dua bahasa (Indonesia-Inggris) (Sirait, 2018). Hal tersebut menjadi pemicu atas kompetisi pendidikan baik pada tingkatan dasar hingga menengah.

Terlepas dari hal diatas, pemerataan pendidikan menjadi topik yang sampai saat ini selalu berada di permukaan. Sebab, tidak hanya terbalut dengan isu ekonomi, namun pemikiran dari masyarakat sendiri juga memiliki corak yang berbeda-beda. Secara global, di Indonesia tercatat pada tahun 2021, terdapat 75.303 telah putus sekolah dari semua

jenjang (Databoks, 2022). Hal tersebut dihitung secara global dari semua provinsi di Indonesia.

Artinya, program dan tujuan mulia bangsa Indonesia untuk mencerdaskan setiap insan, tergolong memiliki pekerjaan rumah begitu besar. Hal tersebut juga bisa diklasifikasikan berdasarkan alasan. Secara umum, mereka memiliki indikator penyebab putusnya sekolah, yaitu karena faktor ekonomi, pemerataan biaya pendidikan, dan lingkungan.

Peninjauan pertama ialah sebab faktor ekonomi, apabila ditinjau dari hitungan statistik, Badan Pusat Statistik melakukan hitungan angka, sebesar 25,90 Juta jiwa pada bulan Maret 2023 (Badan Pusat Statistik Nasional, 2023). Sehingga, secara nasional angka tersebut turun 0,46 juta orang per September 2022. Artinya apa? Status ekonomi juga mempengaruhi keberadaan pemerataan biaya pendidikan.

Sehingga faktor pemerataan inilah yang sampai saat ini sudah pada taraf perbaikan dalam pembangunan pendidikan. Maksudnya, pemerintah selalu memperhatikan, bahwasanya kebutuhan pendidikan masyarakat tidak hanya berhenti pada ranah registrasi, melainkan juga beberapa kebutuhan pendidikan seperti akomodasi, perlengkapan belajar, hingga pembelanjaan atribut sekolah, merupakan beban yang dirasakan oleh masyarakat (Zamjani, 2019).

Sehingga keberadaan Kartu Indonesia Pintar, sebagaimana Irsyad menjelaskan, ketepatan sasaran, proses pencairan anggaran hingga kepada sasaran, serta pola pemanfaatan anggaran, perlu ada pengawasan dan pendampingan secara kolektif (Zamjani, 2019). Juga demikian mengenai pengaruh eksternal dari tiap keluarga. Yaitu lingkungan. Selama ini lingkungan pendidikan juga mempengaruhi pola belajar peserta didik.



Banyak faktor yang menjadi bahan diskusi pada faktor lingkungan tersebut. Dimulai dari internal keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, hingga faktor eksternal lainnya. Dimulai dari lingkungan keluarga. Abdul Hakim dalam penelitiannya membeberkan, beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah ialah karena faktor keluarga, yang mana ia menilai terdapat 5% kepala keluarga yang juga memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Artinya, dukungan orang tua tidak mampu dimaksimalkan secara moral didalam lingkup mereka (Hakim, 2020). Selain juga karena didukung dengan kondisi ekonomi dan pendapatan orang tua setiap bulannya.

Faktor lingkungan masyarakat juga mempengaruhi didalamnya. Pertama adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga menentukan mengenai motivasi belajar, sarana prasarana, inovasi belajar, hingga bagaimana SDM didalamnya mampu mengikat hati para pelajar. Hal tersebut juga menjadi pemicu bagi peserta didik untuk memotivasi akan melangsungkan belajarnya.

Faktor lingkungan masyarakat juga mempengaruhi didalamnya. Pertama adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga menentukan mengenai motivasi belajar, sarana prasarana, inovasi belajar, hingga bagaimana SDM didalamnya mampu mengikat hati para pelajar. Hal tersebut juga menjadi pemicu bagi peserta didik untuk memotivasi akan melangsungkan belajarnya.

Juga demikian dengan interaksi sosial antar pelajar. Beberapa kasus penyimpangan sosial di sekolah, memiliki rerata hampir 50% keatas, pelajar mengalami putus sekolah (Kamsihyati et al., 2016). Hal ini disampaikan karena sebab *bullying*, perundungan, tawuran

antar pelajar, hingga sampai masih terdapat sisa kasus narkoba.

Selanjutnya, adalah faktor lingkungan masyarakat. Norma sosial memiliki peran yang sangat besar. Peran lingkungan masyarakat juga lebih dominan dalam mempengaruhi keberadaan ini. Seperti keberadaan perempuan yang tidak dituntut untuk belajar sampai pada jenjang yang tinggi, menyebabkan banyak kaum perempuan menyudahi untuk tidak melaksanakan sekolah kembali (Alifa, 2023). Dan beberapa faktor eksternal seperti karena faktor geografis, hingga kondisi kesehatan peserta didik yang menekannya menjadi putus sekolah.

Dari beberapa faktor tersebut, apabila dikritisi satu persatu, akan memberikan pandangan baru bagi para orang tua wali murid yang menyekolahkan peserta didiknya. Seperti faktor ekonomi atau kondisi keluarga. Padahal dalam Undang-undang yang tertera mengenai wajib belajar 12 tahun (Iis Margiyanti & Siti Tiara Maulia, 2023), sehingga pemerintah mengeluarkan solusi untuk menghadirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Zamjani, 2019) yang sampai saat ini juga masih melakukan perbaikan secara berkala.

Artinya, keseriusan pemerintah juga harus disambut dengan baik oleh masyarakat. Perangkat desa hingga RT sebagai kepanjangan pemerintah juga perlu memberikan motivasi tinggi bagi warga miskin didalamnya. Demikian juga lingkungan masyarakat yang masih memiliki pola pikir yang kurang memihak. Sehingga menyebabkan pembangunan manusia di Indonesia juga mengalami hambatan kenaikan prosentase. Maka dari itu, kerjasama secara komunikatif, harmonis dan berkelanjutan, adalah wujud gotong royong dalam rangka mensukseskan pendidikan di Indonesia.



Demikian juga dengan perbaikan sekolah, baik berupa perangkat keras dan lunaknya. Baik secara akses, fasilitas dan pola pembelajarannya. Perhatian tersebut perlu adanya akselerasi pembenahan dan perbaikan. Yang mana pemerintah perlu bergandengan tangan dengan pihak lainnya yang berminat dalam pembenahannya. Juga demikian mengenai interaksi sosial di dalam lembaga pendidikan. Perlu adanya tekanan positif, sehingga proses belajar dapat dituntaskan sebagaimana cita-cita pendidikan di Indonesia berhasil. Juga faktor kesehatan yang terkendala, adalah salah satunya menjadi pembahasan pada penelitian lainnya, apabila memerlukan koordinasi atau kolaborasi kerja dari pihak kesehatan dalam menyelesaikannya. Sebab hal tersebut merupakan faktor yang perlu dibantu secara urgent bagi keberlangsungan belajar.

Namun, definisi putus sekolah merupakan keniscayaan kepada para masyarakat untuk putus belajar. Sebab, mereka tidak dikatakan tidak sekolah, ketika mereka masih melangsungkan kegiatan di tempat belajar non-formal seperti pengajian, les private, hingga pada pelatihan.

Beberapa faktor dan fakta diatas, peneliti mencoba menarik secara khusus mengenai batasan penelitian yang akan dilaksanakan. Yaitu dalam lingkup perkotaan, yang mana ditelaah secara khusus dalam pembahasan ini, bagaimana ketika posisi masyarakat yang putus sekolah tersebut berada pada kategori minoritas secara beragama.

Sehingga peneliti hendak menelaah secara mendalam bagaimana masyarakat muslim di kota Denpasar dalam mempertahankan pendidikannya. Demikian juga mengenai peran pemerintah, atau pihak terkait mengenai

pemerataan pendidikan didalamnya. Sebab, peran pihak lain seperti lembaga filantropi, hingga organisasi massa (ormas) juga memiliki dorongan dan motivasi yang sama untuk melangsungkan pendidikan di Indonesia.

Juga demikian mengenai tentang peran pendidikan Islam. Sebagaimana jargon daripada hadis nabi yang menceritakan kewajiban belajar sepanjang hayat (Darani, 2021). Adalah sebuah jargon pada pendidikan Islam saat ini. Yang semestinya para pelaku pendidikan juga mensupport para pelajar yang terindikasi hendak putus sekolah, atau bahkan tidak bisa sekolah karena kendala.

Penelitian ini juga dikhususkan pada fokus objek pada masyarakat muslim di Denpasar, Bali. Sehingga bagaimana paradigma masyarakat muslim di perkotaan mampu menyelesaikan wajib belajarnya, serta peran pendidikan Islam dalam melangsungkan pemerataan pendidikan bagi masyarakat Bali. Sehingga, ditengah-tengah tantangan serta tekanan dalam beragama, mereka tetap terpandang tangguh dan terdidik ditengah-tengah hiruk pikuk wilayah metropolitan Denpasar.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang ada di kota Denpasar, Bali. Adapun objek penelitiannya ialah masyarakat Denpasar, Bali. Adapun tujuan penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi pendidikan Islam dalam melangsungkan pemerataan pendidikan pada masyarakat muslim di Denpasar, Bali.

Adapun proses pengambilan data pada penelitian ini bersifat kajian Pustaka, serta dokumen statistik yang sudah disediakan



oleh pemerintah provinsi Bali. Dan Teknik analisis pada kajian ini ialah mengkritisi beberapa referensi, dokumentasi dengan mengambil pisau analisis teori keadilan sosial milik John Rawls (Faiz, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Beberapa kajian statistik mengenai pemerataan pendidikan di Denpasar, Bali. Peneliti mengambil dari beberapa data yang terpampang berdasarkan angka putus sekolah, hingga angka kemiskinan. Dua data tersebut sebagai dasar analisis peneliti untuk mendiskusikan mengenai pemerataan pendidikan di Denpasar, Bali.

Pertama, mengenai angka kemiskinan masyarakat Denpasar secara utuh. Dari data statistik, tercatat 27,69 % masyarakat Denpasar dibawah angka kemiskinan (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2023). Dalam beberapa data yang lain sebagai penunjang dari angka kemiskinan tersebut, maka angka putus sekolah pada jenjang SD/ MI sekitar 0,003 % dan jenjang SMP/ MTs 0,005 % (Data Denpasar Kota, 2022). Ternyata, angka putus sekolah di Denpasar pada jenjang SD/ MI hingga SMP/ MTs sangat rendah. Apabila dianalogikan, dari 1000 peserta didik, yang putus sekolah pada jenjang SD/ MI hanya 3 peserta didik. Demikian juga pada jenjang SMP/ MTs, dari 1000 peserta didik, hanya 5 peserta didik yang putus sekolah.

Sedangkan pada jenjang SMA/ SMK/ MA, sebanyak 0%. Artinya, masyarakat Denpasar bersama pemerintah mampu meminimalisir. Namun dalam kenaikan strata pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, hanya 68% peserta didik yang melanjutkan pada jenjang perguruan tinggi dari tingkat D1 sampai S1 (Databoks 2021-2023, 2023). Keterangan ini menunjukkan betapa komitmennya masyarakat Denpasar terhadap pendidikan. Sehingga mereka mampu menyelesaikan aturan dan undang-undang pemerintah terkait wajib belajar 12 tahun secara tuntas (Iis

Margiyanti & Siti Tiara Maulia, 2023).

Teringat mengenai keterangan JV. Hackman, ia mengemukakan terkait dampak terbaik bagi daerah yang memiliki masyarakat yang memiliki kepedulian pendidikan hingga tuntas, mereka akan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan cenderung produktif dan inovatif. Demikian juga secara otomatis akan meminimalisir ketimpangan sosial dan memperbaiki stabilitas sosial (Hackman, 2019).

Kualitas hidup masyarakat, menjadi urgen ketika ia mampu menuntaskan jenjang pendidikannya, sehingga peluang kerja, peluang kebermanfaatannya dihadapan publik juga dianggap profesional, dan tidak memberikan kesulitan baginya untuk beradaptasi secara bijak di lingkungan manapun.

Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan dampak produktif dan inovatif. Diskusi terkait pertumbuhan ekonomi, pendidikan memiliki peran secara utuh, ketika masyarakat memiliki investasi pendidikan secara maksimal (pendidikan sejak dini). Artinya, pertumbuhan ekonomi secara tradisional dikemukakan oleh pakar ekonom karena tiga hal, yaitu lahan, tenaga kerja, dan modal. Tenaga kerja serta modal menjadi dititik beratkan oleh mereka, sebab, konsep ekonomi modern memerlukan masyarakat terpelajar (Hicks, 1987).

Juga yang paling penting ialah mengenai stabilitas sosial. Kedewasaan masyarakat akan berlangsungnya kehidupan sosial, pendidikan mempengaruhi secara mayoritas atas keadaan sosialnya. Apabila masyarakat dalam keadaan pendidikan rendah, mereka akan menemukan konflik sosial dengan angka kemungkinan yang tinggi. Berbeda dengan mereka secara garis besar menggapai strata pendidikan secara tinggi, mereka akan memberikan profil masyarakat yang stabil (Heyneman, 1997).



Ketiga hal tersebut, juga tidak berarti karena pengaruh sekolah formal mengungguli masyarakat yang tidak sekolah, melainkan gambaran besar daripada mereka yang tidak memprioritaskan untuk mengenyam pendidikan formal.

Namun, berbeda halnya dengan pembiasaan masyarakat yang membaca. Ia akan dapat mencapai ketiga faktor utama sebagaimana dijelaskan diatas, apabila terdapat bimbingan literasi dari professional. Hal tersebut juga dikemukakan Jimenez, dkk (Jimenez et al., 2024), yaitu dampak yang paling dapat dinilai secara jelas oleh masyarakat ialah, literasi sebagai alat antisipasi konflik sosial. Pemerataan pendidikan formal yang dilakukan oleh pemerintah kota Denpasar, bersama-sama masyarakat didalamnya, menunjukkan komitmen kuat terhadap bagaimana seharusnya ibu kota Pulau Bali, merupakan sebagai referensi turis mancanegara, sehingga memerlukan sumber daya manusia didalamnya secara kreatif, dan mampu mengantisipasi konflik sosial.

Peran pendidikan Islam di kota Denpasar, merupakan bentuk kontribusi dalam pemerataan dan pembangunan pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan bagaimana ia tetap eksis baik secara kurikulum, lembaga pengkajian keagamaan structural, hingga beberapa perannya pasca keberadaan muslim Bali muslim mendapatkan kesulitan secara demografi untuk memasukinya. Bisa dikatakan sebagai islamophobia di Bali pasca tragedi bom Bali yang mengatasnamakan agama.

Secara struktural, kebijakan tersebut lebih diberatkan dengan beberapa persyaratan, seperti pendirian masjid, hingga bagaimana dengan penduduk muslim musiman (perantau). Juga dukungan kuat tersebut dibuktikan dengan angka mayoritas penduduk Bali adalah Hindu (Basyir, 2014). Sehingga siasat yang dilakukan oleh penduduk muslim ialah mendirikan musholla sebagai sarana

ibadah.

Sehingga pendidikan Islam pada saat ini di Denpasar juga memperhatikan persaingan pendidikan di Denpasar pada era disrupsi saat ini. Fawaid (Fawaid, 2019) mengklasifikasikan capaian akhir pendidikan Islam pada pendidikan dasar ialah penguatan keagamaan secara dasar, hingga mereka ketika pada jenjang pendidikan menengah, sudah pada capaian pengembangan sains dan teknologi.

Disisi lain, peminatan masyarakat Denpasar, Bali terhadap sekolah Islam sangatlah tinggi. Fawaid juga menjelaskan (Fawaid, 2019), bahwasanya lembaga pendidikan Islam di Bali sampai saat ini selalu menunjukkan angka peminatan masyarakat muslim untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat tersebut.

Peran Stake Holders Dalam Pemerataan Pendidikan di Denpasar, Bali

Secara sederhana, stake holder dalam pendidikan ialah pihak yang terkait atas kemajuan pendidikan itu sendiri (Anjarsari et al., 2018). Stakeholder bisa dikatakan sebagai pemangku kepentingan, pemegang kebijakan, mitra pendidikan, hingga orang tua wali murid merupakan bagian dari stakeholder pendidikan.

Pembahasan ini, terkait tentang bagaimana pemerintah terkait melakukan strategi pemerataan pendidikan. Kedua, bagaimana stakeholder lainnya juga melakukan pemerataan pendidikan di Denpasar. Ketiga, bagaimana strategi pendidikan Islam dalam melakukan pemerataan pendidikan. Hal tersebut menjadi keniscayaan bagi kota Denpasar beserta para stakeholder pemerintah apabila enggan memfasilitasinya. Apalagi program *smart city* Denpasar mengacu pada *smart philosophy and smart creativity* (Graha, 2020).

Pertama, kiat pemerintah melakukan



pemerataan pendidikan di kota Denpasar. Ketika melihat bagaimana presentase peserta didik putus sekolah, secara normatif pemerintah kota Denpasar, dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan dan pemegang kepentingan didalamnya, mereka telah sukses meminimalisir peserta didik putus sekolah.

Namun, dalam kaitannya terkait preferensi masyarakat kota Denpasar yang beragama muslim, banyak para orang tua wali murid menginginkan untuk menyekolahkan peserta didiknya di sekolah Islam. Namun, dalam data yang tercatat daftar sekolah dimulai dari SD hingga SMA atau sederajat di kota Denpasar, hanya sekitar 7-15 sekolah pada tiap-tiap jenjang. Sehingga banyak sekolah yang menolak dengan dalih kuota penuh (Fawaid, 2019). Sebenarnya, pada pembahasan mengenai pendidikan formal, visi dan misi kota Denpasar terkait *smart city* terdapat salah satu program mengenai pendidikan kreatif, artinya, beberapa peran *stakeholders* seharusnya mampu memberikan kontribusi penuh untuk menunjang pendidikan Islam sebagai komitmen pemerataan.

Kedua, beberapa lembaga filantropi ketika ditinjau dari fungsinya, sudah melakukan komitmen beberapa program untuk membantu program pendidikan pada masyarakat. Seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), NU-Care Lazisnu, dan Lazismu. Ketika peneliti melihat keberadaan Baznas, mereka mengeluarkan program SKSS yang memiliki kepanjangan Satu KK Satu Sarjana (Adniyah et al., 2021). Program ini hanya membantu salah satu anggota keluarga dari kalangan fakir miskin agar menuntaskan pendidikannya hingga sarjana.

Demikian NU Care Lazisnu yang hanya memberikan biaya pendidikan melalui 5 pilar programnya NUCARE Cerdas (Lazisnu, n.d.). Program ini juga hanya memperkuat sarana prasarana lembaga pendidikan, beasiswa pendidikan, pemerataan pendidikan, hingga pelatihan keterampilan bagi semua

masyarakat.

Sedangkan lembaga ketiga ialah Lazismu. Mereka memberikan secara merata kepada anggotanya secara internal adalah lebih utama. Sebagaimana programnya tentang Pilar Pendidikan Lazismu, yang memberikan bantuan Tab sebagai komitmen modernisasi pendidikan, beasiswa Dhuafa, bantuan SPP bagi mahasiswa, pembibitan kader dengan memberikan bantuan anggaran studi lanjut magister hingga doktoral, juga demikian melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana melalui program *Save Our School* (Lazisnu, n.d.). Dari ketiga program tersebut, pada hakikatnya memiliki prinsip manajemen pengelolaan anggaran tersendiri. Juga demikian cakupannya. Sehingga dari beberapa program tersebut belum ada yang mampu mewujudkan suatu kesatuan lembaga pendidikan formal di wilayah Denpasar. Padahal secara pandangan kasat mata, masyarakat muslim yang berada di daerah tersebut memerlukan penambahan unit lembaga pendidikan Islam secara formal.

Namun, apabila definisi pemerataan pendidikan Islam ini dikatakan secara luas, maka di Denpasar masih terdapat puluhan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan Madin (Madrasah Diniyah) didalamnya dengan jumlah sekitar 30 sampai 45 unit lembaga pendidikan Islam non-formal (Kementerian Agama Kota Denpasar, 2020). Lembaga tersebut sebenarnya menjadi penyeimbang pemerataan pendidikan Islam bagi masyarakat muslim Denpasar, yang pada pembahasan ini juga memposisikan dirinya sebagai masyarakat minoritas.

Pada hakikatnya, minoritas masyarakat Denpasar, ketika mampu mengubah pola pikirnya dalam menyetarakan pendidikan Islam di perkotaan Hindu, mereka melakukan jemput bola untuk berkomunikasi secara berkala kepada guru PAI di sekolah formal. Sebab, keberadaan madrasah diniyah dan TPQ di Denpasar, adalah ujung tombak untuk



memperkokoh nilai-nilai keislaman bagi investasi pendidikan Islam masa depan (Dasopang & Lubis, 2021).

Strategi tersebut juga dilakukan oleh beberapa titik daerah minoritas muslim, yang juga berposisi di Kawasan elit perkotaan. Sehingga orang tua wali murid juga mampu memperdulikan anak-anaknya untuk tetap menyambung ikatan pendidikan non-formal untuk aktivitas keagamaannya (Arifin, 2019).

Strategi Pendidikan Islam Dalam Pemerataan Pendidikan Masyarakat Denpasar, Bali

Pendidikan Islam memiliki peran besar untuk mempertahankan keyakinan beragama bagi penduduk minoritas muslim. Sebagaimana N. L. Hick, mengemukakan bagaimana pentingnya investasi pendidikan untuk tetap menjaga, merawat dan mengembangkan karakter yang berkualitas dikemudian harinya (Hicks, 1987).

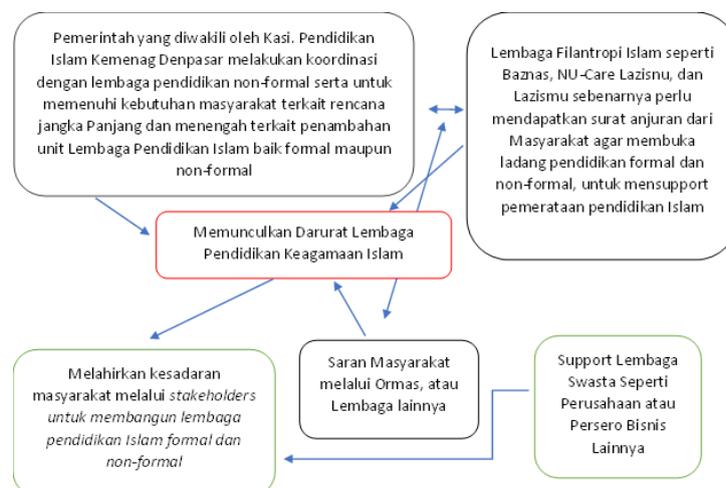
Maka, pendidikan Islam juga perlu mempertahankan keyakinan masyarakat muslim, dengan ara menjaga dan merawatnya. Sebagaimana pembiasaan dan pendampingan, bukan hanya merupakan peran dari para guru pendidikan agama Islam secara professional saja, namun orang tua wali murid juga secara berkala mengawalinya. Demikian juga dengan keyakinannya dalam pengetahuan ketauhidan.

Mereka perlu adanya pendalaman keagamaan ketika berada diluar pendidikan formalnya (Suliantika & OK, 2023).

Beberapa problem masyarakat muslim dalam memeluk keyakinan agamanya, mereka masih memerlukan negosiasi kultural untuk mempertahankan eksistensi dan identitasnya (MUSLIM, DAN BUDAYA MASYARAKAT. OTORITAS KEAGAMAAN, POLITIK DAN BUDAYA MASYARAKAT MUSLIM., n.d.) Artinya, terkadang pengikisan populasi muslim di daerah minoritas, terkadang juga karena problem personal, baik dari jalur pernikahan, hingga gaya hidup yang jauh dari kebiasaan masyarakat muslim.

Sehingga, perlu pemerintah melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait dalam rangka memperbanyak unit lembaga pendidikan formal dengan beberapa support dari stakeholders, baik dari swasta, hingga perusahaan lain yang peduli dengan pendidikan. Demikian juga dengan keberadaan lembaga pendidikan non-formal, perlu adanya sosialisasi penyadaran masyarakat terkait urgensi pendidikan Islam di lingkungan minoritas.

Sehingga pemerataan pendidikan tidak hanya berada pada jumlah peserta didik yang putus sekolah, melainkan pemerataan juga pada pemerataan pemahaman terhadap keagamaan, merupakan juga prinsip dari falsafah negara Indonesia, yaitu keadilan sosial. Sebagaimana sketsa tersebut apabila dilihat dari bagan, ialah seperti dibawah ini:



Bagan diatas menunjukkan pola kerja untuk mewujudkan pemerataan pendidikan Islam di kota Denpasar. Meskipun jumlah penduduk muslim terbanyak nomer dua di Denpasar, namun perlakuan minoritas secara tidak langsung dapat dirasakan. Hal ini sebagaimana pernah dipaparkan oleh Millah, dkk. Bahwasanya, perilaku yang semestinya mendapatkan porsi belajar atau mengajar yang banyak, akan menjadi terkikis karena keadaan (Muthohharoh et al., 2024).

Sehingga kiat untuk mempertahankannya ialah dengan melakukan kerjasama kolektif. Dengan melahirkan isu darurat pendidikan Islam. Ketika isu tersebut naik pada permukaan, maka usaha pemerataan pendidikan Islam bagi masyarakat muslim Denpasar dapat dipenuhi secara berkala.

Apabila kondisi pemerataan pendidikan Islam ini ditinjau dari pakar politik John Rawls (Faiz, 2009), maka sebenarnya perspektif keadilan dalam pemerataan pendidikan dapat ditinjau dari beberapa prinsip teorinya. Bagaimana kondisi Bali pada asalnya (*The Original Position*), apabila ditarik dari sejarah, Bali pada asalnya memiliki dominasi Hindu yang sangat kuat. Sehingga corak yang terlihat adalah corak budaya dan adat Hindu. Sehingga beberapa masyarakat Hindu sebagian besar, terlihat seperti tidak mengetahui (*Veil of Ignorance*).

Selanjutnya, apabila ditinjau dari posisi asal, Seyogyanya pemegang kebijakan yang pada faktanya didominasi oleh kelompok Hindu, juga memegang prinsip kebebasan dan perbedaan (*difference principle*). Mengapa? Karena di era saat ini, banyak para pendatang musiman yang juga merantau di Bali dengan menyandang status muslim.

Sehingga *Justice as Fairness* dalam pandangan Rawls merupakan sebuah kewajiban. Dan kebutuhan untuk menambah unit lembaga pendidikan Islam baik dalam bentuk tempat ibadah, sekolah, madrasah,

hingga TPQ adalah suatu kewajiban untuk mewadahi investasi pendidikan Islam, tanpa mengganggu visi dan misi masyarakat mayoritas didalamnya.

Kesimpulan

Pemerataan pendidikan di kota Denpasar, Bali sangatlah minim. Ketika ditinjau dari prosentase peserta didik yang putus sekolah. Namun, dari beberapa data yang dilihat, terdapat ketimpangan keberlanjutan pendidikan. Maksudnya, terdapat 40% peserta didik tidak melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi, ketika ia telah menuntaskan program wajib belajar 12 tahun pemerintah.

Usaha pendidikan Islam dalam melakukan pemerataan, sebenarnya sudah ditunjukkan oleh beberapa pihak swasta maupun pemerintah, seperti lembaga filantropi untuk membantu beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi muslim, hingga lulus. Namun pemerataan pendidikan apabila ditinjau dari perspektif Islam, memiliki makna yang lebih luas.

Makna tersebut ialah pemerataan pendidikan keagamaan bagi masyarakat muslim. Pendidikan keagamaan akan dapat dikatakan rata, ketika lembaga pendidikan formal tidak menolak pendaftaran peserta didik baru dengan alasan kuota. Demikian juga pentingnya membumikan TPQ dan Madrasah diniyah bagi masyarakat muslim di Denpasar. Sehingga pendidikan sepanjang hayat tetap diperhatikan oleh banyak pihak, baik dari struktur kelembagaan formal, hingga non-formal.

Sehingga dalam pandangan Rawls, prinsip keadilan sosial yang dikemukakan dalam teorinya *social justice*, memberikan pandangan keadilan secara fakta kepada masyarakat Denpasar pada umumnya. Sehingga kebutuhan pemerataan pendidikan Islam benar-benar menjadi darurat, perlu adanya penambahan unit lembaga pendidikan Islam (WALDRON, 1986).



Daftar Pustaka

- Adniyah, A., Agrosamdhyo, R., & Iswahyuni, I. (2021). Efektivitas Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) BAZNAS Provinsi Bali dalam Meningkatkan Prestasi Akademik di STAI Denpasar Bali. *Widya Balina*, 6(2).
<https://doi.org/10.53958/wb.v6i2.115>
- Alifa, V. N. (2023). Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Putus Sekolah di Indonesia pada Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 3(2), 175.
<https://doi.org/10.30659/jp-sa.3.2.175-182>
- Anjarsari, P., Tentiasih, S., Mulyono, E., & Hera, F. (2018). MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN STAKEHOLDER PENDIDIKAN . *Pendidikan*, 7(2), 1–16.
- Arif, A. A., & Arafa, M. (2023). Regulasi Advokasi Pendidikan Agama Islam Di Indonesia. *PAIDA: Jurnal Pendidikan Agama Islam UNIMUDA*, 2(1).
- Arifin, B. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI DAERAH MINORITAS MUSLIM DAN KAWASAN ELITE. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 10(2), 1–9.
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2023). Jumlah Penduduk Miskin Kota Denpasar Dan Provinsi Bali (Ribu Jiwa), 2021-2023. BPS Kota Denpasar.
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2023). Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia . BPS Indonesia.
- Basyir, K. (2014). Pola Kerukunan Antarumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 1.
<https://doi.org/10.15642/islamica.2013.8.1.1-27>
- Darani, N. P. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 133–144.
<https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14345>
- Dasopang, M. D., & Lubis, A. H. (2021). PEREMPUAN-PEREMPUAN TANGGUH PENJAGA NILAI-NILAI KEISLAMAN ANAK: STUDI DAERAH MINORITAS MUSLIM. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 83.
<https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.353>
- Data Denpasar Kota. (2022). Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI Dan SMP/MTs Kota Denpasar . Data Denpasar Kota.
- Databoks. (2022). Jumlah Penduduk Indonesia Yang Putus Sekolah . Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/berapa-jumlah-anak-putus-sekolah-di-indonesia>.
- Databoks 2021-2023. (2023). Jumlah Masyarakat Denpasar Yang Tidak Melanjutkan Sekolah & Perkuliahan Pada Jenjang SMA/SMK/MA Hingga S1. Databoks .
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Fawaid, M. (2019). Lembaga Pendidikan Islam Bali di Era Revolusi Industri 4.0. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 3(1), 430–439.
- Graha, I. M. S. (2020). PROSES KOTA DENPASAR MENUJU SMART CITY. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 4(2), 11.
<https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i2.125>
- Hackman, J. V. (2019). Economic Development and Reproduction: Understanding the Role of Market Opportunities in Shaping Fertility Variation. Arizona State University.
- Hakim, A. (2020). FAKTOR PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH. *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 122–132.
<https://doi.org/10.33830/jp.v21i2.907.2020>
- Heyneman, S. P. (1997). Education and Social Stability in Russia: an essay. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 27(1), 5–18.
<https://doi.org/10.1080/0305792970270102>
- Hicks, N. L. (1987). Education and Economic Growth. In *Economics of Education* (pp. 101–107). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-033379-3.50022-X>
- Iis Margiyanti, & Siti Tiara Maulia. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 199–208.
<https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1509>
- Jimenez, M. E., Uthirasamy, N., Hemler, J. R., Bator, A., Malke, K., Lima, D., Strickland, P. O., Ramachandran, U., Crabtree, B. F., Hudson, S. V., Mackie, T. I., & Mendelsohn, A. L. (2024). Maximizing the impact of reach out and read literacy promotion: anticipatory guidance and modeling. *Pediatric Research*, 95(6), 1644–1648.



- <https://doi.org/10.1038/s41390-023-02945-z>
Kamsihyati, T., Sutomo, & FS, S. (2016). Kajian Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap (Study on Factors of School Drop-out in Jangrana Village Kesugihan Sub-district, Cilacap District). *Geo Edukasi*, 5(1), 16–21. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdukasi/index>
- Kementerian Agama Kota Denpasar. (2020). Data Lembaga Keagamaan Kementerian Agama Tahun 2020 . Kementerian Agama Kota Denpasar.
- Lazisnu, N. C. (n.d.). 5 Pilar Program NU Care-Lazisnu . Pilar Program NU Care-Lazisnu. Retrieved August 11, 2024, from https://nucare.id/pilar_program.
- MUSLIM, DAN BUDAYA MASYARAKAT. Otoritas Keagamaan, Politik dan Budaya Masyarakat Muslim. (n.d.). Retrieved August 11, 2024, from https://www.academia.edu/download/58411900/Proceeding_Graduate_Forum.pdf.
- Muthohharoh, N. M., PS, A. M. B. K., Putri, A. R., Mubaddilah, A. F., & Muvid, M. B. (2024). The Role of Islamic Religious Education Teachers in Advocating for Muslim Minority Students in Denpasar, Bali. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 16(1), 137–148. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i1.4113>
- Salim, K., & Sari, M. P. (2014). PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN. Makalah Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, STAI Abdurahman Kepulauan Riau., 1–11.
- Sirait, J. (2018). Penerapan Sekolah Bertaraf Internasional di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Kependidikan*, 9(1).
- Suliantika, S., & OK, A. H. (2023). PENGUATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI SISWA MINORITAS MUSLIM. *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI*, 6(2), 325. <https://doi.org/10.32529/al-ilm.v6i2.2816>
- Umar, M., & Ismail, F. (2018). Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam (Tinjauan Konsep Mutu Edward Deming dan Joseph Juran). *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11(2). <https://doi.org/10.30984/jii.v11i2.581>
- WALDRON, J. (1986). John Rawls and the Social Minimum. *Journal of Applied Philosophy*, 3(1), 21–33. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5930.1986.tb00046.x>
- Zamjani, I. (2019). PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR BAGI PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR REGULER: STUDI DI EMPAT DAERAH KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN TAHUN 2017. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 64–82. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v11i2.225>

